

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bali sebagai objek pariwisata terkemuka bukan hanya menarik dari segi budaya dan tempat *tourism* saja, tetapi juga sejarah sosial-politiknya yang panjang. Menariknya adalah, pola kepemimpinan lokal di Bali masih didominasi oleh elite istana (Puri) dalam suksesi kepemimpinan kepala daerah. Budaya politik yang terbentuk cenderung mengarah pada sistem feodalisme, di mana status aristokrat elite puri memiliki daya magnet tersendiri bagi masyarakat. Puri sebagai simbol budaya merupakan akar dari tradisi keagamaan, adat istiadat yang diwarisi dari nenek moyang sebelumnya. Puri sebagai lambang kekuasaan dan kekuatan tradisional merupakan perwujudan raja dalam mengendalikan dan menjalankan roda pemerintahan. Puri bahkan disebut sebagai tempat beroperasinya nilai-nilai kekuasaan. Peran yang dimainkan oleh puri tidak hanya dalam ranah agama, budaya, dan politik tetapi juga dalam kehidupan ekonomi masyarakat seperti peran puri sebagai agen perubahan yang memperkenalkan pariwisata berbasis budaya dan spiritual, serta ekonomi (Suwitha, 2015).

Apalagi pergulatan sistem sosial yang sudah ratusan tahun tertanam dalam masyarakat Bali. Sebelum penjajahan Belanda, peran puri dikenal sangat menonjol dalam kanvas politik lokal. Perluasan Majapahit, ditandai dengan penerapan sistem “kasta” yang ketat. Di masa kolonial Belanda sendiri, kerajaan-kerajaan lokal cukup banyak memiliki interaksi dengan mereka. Belanda juga sempat menerapkan kebijakan *Baliseering*<sup>1</sup> di mana upaya untuk mempreservasi budaya Bali termasuk membantu menguatkan sistem sosial lokal kasta. Tujuannya bukan tidak, adalah untuk mempertahankan kekuasaan oleh kolonial melalui tangan penguasa, kepada terutama dua tingkat tertinggi dalam kasta (Dessy, 2020). Sistem kasta pada

---

<sup>1</sup> *Baliseering* atau Balinisasi adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1920an dalam upaya menjaga pergerakan politik yang berada di Jawa agar tidak menyebar ke Bali. Namun kebijakan ini juga digunakan untuk menjaga tradisi dan budaya “Hindu kuno” Bali dari kalangan luar.

dasarnya mewakili stratifikasi sosial berdasarkan hak lahir yang dibenarkan oleh konsep moral dan agama. *Brahmana* memegang kekuasaan paling besar dalam masyarakat Hindu, mereka adalah pendeta, atau dikenal sebagai pemimpin spiritual dan intelektual masyarakat. *Brahmana* yang dilambangkan keluar dari mulut Dewa Brahma merupakan lambang bahwa kelas tersebut adalah guru atau guru spiritual.<sup>2</sup> Mulut adalah saluran untuk pikiran, sehingga suara *Brahmana* harus didengar dan dipatuhi (Sidemen, 2019). Sedangkan *Ksatria*, yang dilambangkan berasal dari tangan Brahma, berfungsi sebagai kelas pemerintah. Tangan diperlukan untuk membawa senjata selama perang, untuk itu memimpin dan menjalankan pemerintahan.

Pengaruh Majapahit terhadap kasta bukan hanya berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat Bali. Tetapi pada akhirnya ikut masuk kedalam sistem politik lokal di Desa. Raja-raja dibawah kendali Majapahit menempatkan wakil *punggawa* representasi di tiap desa (Budihardjo, 2012).<sup>3</sup> Tokoh sesepuh dari desa yang telah tunduk pada pemerintahan Majapahit yakni Kerajaan Gel-gel (sebagai kepanjangan tangan Majapahit) diberi penghargaan sebagai pemimpin yang ikut mengawasi kondisi desa. Susunan struktur pemerintahan kerajaan dibangun dengan sistem raja di bagian paling atas, kemudian di bawahnya ada patih, dan jabatan selanjutnya adalah *punggawa*. Sedangkan beberapa wakil bisa memantau kondisi desa atau parekin dan memberikan laporan kepada raja yaitu bendesa atau perbekel.

Dalam masyarakat tradisional, penguasa cenderung dipahami sebagai konsep kekuasaan yang berkaitan dengan sistem kepercayaan, karena nilai-nilai yang berfungsi untuk mempertahankan masyarakat berakar pada sistem tersebut. Pemimpin dipandang memiliki kualitas khusus di mana orang lain juga dapat memiliki keistimewaan itu dengan melayani dan terikat erat dengan pemimpinnya. Relasi sosial politik di negara kerajaan lebih menyerupai piramida atau kerucut

---

<sup>2</sup> Brahma adalah salah satu dewa utama dalam agama Hindu, yang memiliki tugas sebagai pencipta dan termasuk kedalam konsep *trimurti*. Didalam konsep *trimurti* terdapat tiga dewa utama Hindu, yakni: Brahma sebagai pencipta, Wishnu sebagai pemelihara, dan Shiwa sebagai pelebur.

<sup>3</sup> Bentuk representasi ini pada akhirnya bertahan hingga sekarang, dalam bentuk kepemimpinan adat yang dipimpin oleh tokoh berpengaruh di kawasan tersebut. Misalnya seperti desa adat yang dipimpin oleh bendesa, dan biasanya mereka berasal dari kalangan elit, seperti puri.

yang puncak dan pusatnya ditentukan oleh penguasa atau raja. Raja dan keluarganya berada di bagian tengah yang dikelilingi oleh lingkungan pemukiman masyarakat di desa. Sehingga puri kerajaan dianggap sebagai ruang yang beradab, sebagai hasil dari meditasi kekuatan spiritual.

Alhasil, sistem pemerintahan feodalis ini berhasil memunculkan kelompok-kelompok elite bangsawan yang memegang tampuk kekuasaan secara turun-temurun. Kaum elite yang mereka berasal dari kasta *Ksatria*, tertinggi kedua setelah *Brahmana* yang termasuk kedalam tiga kasta utama “*Tri wangsa*” (Anwar, 2016). Para Ksatria inilah yang tinggal dalam sebuah tempat tinggal yang disebut dengan puri. Puri pada dasarnya adalah istana para bangsawan di Bali, tempat tinggal para keturunan raja dan keluarganya. Tidak hanya sebagai tempat tinggal anggota kerajaan, puri kerap juga dianggap sebagai simbol status, ukuran besaran pengaruh suatu keluarga di wilayah tertentu (Suwitha, 2015).<sup>4</sup>

Pada masa-masa kemerdekaan Indonesia, elite puri telah muncul dalam konstelasi politik nasional karena adanya pengaruh barat (Belanda) bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, telah muncul beberapa tokoh politik yang berasal dari puri, seperti Tjokorda Gde Raka Soekawati yang merupakan cendekiawan dari Puri Ubud, Ida Anak Agung Gde Agung<sup>5</sup>, raja Gianyar yang mendapat gelar pahlawan nasional untuk berperan aktif dalam upaya kemerdekaan Indonesia, juga telah berjasa dalam diplomasi dan hubungan luar negeri. Selain itu, Anak Agung Panji Tisna yang merupakan putra Raja Buleleng merupakan tokoh politik dan selalu proaktif dalam memperjuangkan kemerdekaan, serta I Gusti Ngurah Rai, tokoh puri yang dikenal sebagai pejuang perang melawan Belanda.

Pada masa orde lama, eksistensi elite puri dalam politik yang kuat terlihat dengan munculnya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang memiliki basis terbesar di

---

<sup>4</sup> Di setiap daerah kabupaten ataupun kecamatan di Bali selalu terdapat satu puri utama yang dikelilingi oleh puri sekitarnya. Puri utama ditinggali oleh mereka yang merupakan keluarga inti kerajaan dan puri sekitarnya adalah kerabat dekat maupun kerabat jauh dari raja.

<sup>5</sup> Ida Anak Agung Gde Agung merupakan raja Gianyar, sekaligus tokoh nasional yang menjadi Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT), juga Tjokorda Gde Raka Soekawati sebagai presiden NIT yang sama-sama berasal dari Gianyar.

Bali karena dominasi suara Pemilu yang dimilikinya pada tahun 1955 (Pramana, 2015). Didalam kesuksesan PNI Bali terdapat tokoh penting puri, Tjokorda Ngurah Agung dari Puri Satria Denpasar (Mahadewi et al., 2017).<sup>6</sup> Selain itu, nama Anak Agung Bagus Sutedja yang menjadi Gubernur Bali pertama setelah henggang dari Sunda kecil semakin mencerminkan bahwa tokoh puri membawa daya magnet tersendiri bagi pemerintahan Soekarno. Kemudian pada masa Orde Baru, sistem politik dijalankan dengan sistem komando yang berarti komunikasi satu arah dari atasan kepada bawahan. Tokoh puri menjadi instrumen atau alat pertahanan kekuasaan Soeharto bersama Partai GOLKAR dan ABRI. Beberapa tokoh puri menjadi elite partai dan menjabat sebagai kepala daerah, seperti Tjokorda Budi Suryawan (CBS) dari Puri Ubud<sup>7</sup>, Tjokorda Artha Ardana Soekawati dan Anak Agung Gde Agung Bharata. Secara umum di Bali afiliasi politik cenderung mengikuti kesetiaan tradisional, sehingga sampai saat ini ketahanan bentuk-bentuk tradisional masih cukup kuat untuk memaksa proses politik nasional mengikuti situasi Bali yang sebenarnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki basis kuat di Bali, juga memiliki perwakilan tokoh puri sebagai basis kepemimpinannya di Bali.<sup>8</sup> Misalnya Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi dari Puri Satrian adalah tokoh Puri yang memelopori lahirnya PNI dan tokoh PDIP Bali, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali periode (2009-2014), Bupati Badung, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bali periode (2014-2019). Selain itu, tokoh Puri Satria yang juga kerap tampil di dunia politik adalah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang juga tokoh PDIP Bali, pernah menjabat sebagai Wali Kota Denpasar, Wakil Gubernur Bali, dan Menteri Koperasi dan UKM periode (2014-2019). Puri Satrian dikenal sebagai pusat PNI dan menjadi

---

<sup>6</sup> Puri Satria Denpasar lebih dikenal saat ini dengan nama menjadi Puri Agung Denpasar.

<sup>7</sup> Tjokorda Budi Suryawan adalah tokoh Puri Ubud yang menjadi Bupati Gianyar selama dua periode, dari masa Orde Baru akhir hingga setelah reformasi 1993-2003.

<sup>8</sup> Puri Satria Denpasar memang terkenal akan tokoh-tokoh puri yang dekat dengan partai trah Soekarno, mengingat PNI Bali diusung oleh tokoh Puri Agung Denpasar (Satria).



ikon PDI-P di Bali, bahkan di era reformasi, puri merupakan cerminan identitas partai tertentu (Mahadewi et al., 2017).

Tidak terlepas puri di Kabupaten Gianyar yang memiliki daya tarik tersendiri di perubahan luar, dalam, dan politiknya. Peta politik puri-puri di Kabupaten Gianyar tidak pernah terbagi secara tegas menurut garis ideologis. Kecenderungan orientasi politik puri lebih sering dipengaruhi oleh kepentingan arus dalam agenda politik Puri saat ini. Dua simbol politik dalam bentuk puri utama dalam Kabupaten Gianyar yang memiliki pengaruh politik signifikan adalah Puri Ubud dan Puri Gianyar. Puri lain seperti Blahbatuh, Sukawati, Payangan, Kantor, memainkan peran yang cukup tapi tidak terlalu menonjol dalam kehidupan politik. Justru Puri Ubud dan Puri Gianyar sering menjadi tuan rumah peristiwa politik baik di tingkat lokal Gianyar maupun daerah Bali. Misalnya, kandidat Gubernur dari Gianyar tentu mencerminkan setidaknya divergensi calon dari Puri Ubud dan Puri Gianyar. Persaingan kedua istana di kancha politik ini sudah berlangsung lama.

Walaupun begitu, dalam wilayah ini terdapat pula berbagai faksi politik. Kecamatan Ubud misalnya, kaum bangsawan sudah lama terpecah menjadi dua arus politik yang terpisah.<sup>9</sup> Sebelum Tjokorda Oka Ardhana Soekawati (Cok Ace) terpilih sebagai bupati di Gianyar, Puri Ubud terpecah menjadi dua suara partai, yaitu Cok Ace dan GOLKAR, dari Cok Ibah.<sup>10</sup> Namun setelah Cok Ace gagal di pemilihan kedua PILKADA, yang lebih dulu dikaitkan dengan partai GOLKAR. Suara puri hanya dapat bercampur jika mereka, dari kalangan bangsawan tersebut memiliki musuh bersama yang harus dihadapi bersama. Ketika tujuan bersama tercapai, masing-masing kelompok kembali ke posisi semula. Menariknya strategi yang dipilih kaum puri untuk mendapatkan dukungan politik dengan memanfaatkan posisi dominan mereka. Dominasi ini dapat berupa ekonomi, budaya, sejarah dan sosial. Puri Gianyar memperkuat posisi politiknya, berusaha untuk dipilih, menjaga

---

<sup>9</sup> Terdapatnya beberapa afiliasi puri dengan partai yang berbeda-beda adalah hal biasa. Agendanya juga bermacam-macam, ada yang memang bermusuhan antar saudara puri, ada juga yang memang membelah kekuatan untuk mendominasi pemilihan.

<sup>10</sup> Tjokorda Raka Kerthyasa (Cok Ibah) adalah keluarga Puri Ubud yang tergabung kedalam partai Golkar saat terpilih sebagai anggota DPRD (2009-2018).

dan memperkuat hubungan politik dengan pusat kekuasaan di Jakarta. Kedekatan Puri Gianyar dengan tokoh nasional memang sudah banyak terdengar. Kedekatan ini mungkin dipengaruhi “takdir” politik Puri Gianyar. Tokoh Puri Gianyar seperti Agung Bharata sempat menjabat sebagai Kepala Istana Kepresidenan membuatnya dekat dengan Megawati (Calvin, 2013).

Tentu saja, hal ini tidak lepas dari eratnya hubungan keluarga puri dengan elite Jakarta termasuk dekat dengan keluarga Megawati. Hal ini tertera didalam sejarah di mana Soekarno sendiri saat mengunjungi Bali kerap menyempatkan diri untuk menyambangi Ubud. Sehingga Ubud mungkin adalah tempat yang cukup memiliki ikatan spesial bagi keluarganya.<sup>11</sup> Berbeda dengan Puri Gianyar yang memilih memperkuat posisi politiknya secara vertikal, para elite Puri Ubud lebih terlihat memperluas pengaruh politiknya di tingkat *grassroot*, dengan menggunakan simbol-simbol budaya dan agama.<sup>12</sup> Pengaruh politik ini diberikan pada kota-kota tradisional di kawasan inti Ubud terutama di area sentral dan pinggiran Ubud seperti daerah Payangan, dan Tegalantang. Serta di perdesaan seperti inilah, Puri Ubud menjalankan semacam hegemoni ritual keagamaan yang lambat laun tunduk dan patuh pada keinginan politik keluarga puri di desa-desa tersebut seperti yang diungkapkan (Geertz, 1980).

Para kaum puri ini menempati posisi di tingkat lokal yang membuat dan melaksanakan kebijakan politik. Elite politik tersebut adalah Gubernur, Bupati, Wali Kota, DPRD, dan pimpinan partai politik. Elite lokal adalah persekutuan orang-orang yang dianggap cerdas dan berpengaruh dalam masyarakat, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang-orang yang memiliki kemampuan finansial relatif tinggi dibandingkan masyarakat umum. Elite mengacu pada minoritas pribadi yang ditunjuk untuk melayani kolektivitas dengan cara yang bernilai secara sosial, dan elite sebagai minoritas yang sangat efektif dan bertanggung jawab dengan orang lain, yang ditanggapi oleh kelompok elite

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan AAGN Ari Dwipayana, Yayasan Puri Kauhan Ubud. 29 Desember 2023.

<sup>12</sup> Kecamatan Ubud selalu terkenal akan seni budaya dan spiritual nya tersendiri, bahkan sejak ratusan tahun lalu semenjak kedatangan bangsa kolonial di Bali. Untuk lebih lanjut dapat dilihat dalam buku Clifford Geertz 1980 Negara Ubud: *The Theater State in Twenty First Century Bali*.

(Amrianto, 2015). Elite terjadi ketika elite penguasa dianggap telah kehilangan kemampuannya dan orang-orang di luar kelas menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka ada kemungkinan kelas penguasa akan terguling dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru.

Eksistensi Puri dalam politik tidak terlepas dari sejarah pemerintahan di Bali yang dipimpin oleh raja atau bangsawan. Pada zaman penjajahan, puri dianggap sebagai penguasa yang memiliki daya magnetis untuk menguasai masyarakat oleh penjajah Belanda, bahkan puri merupakan partner bagi penjajah Belanda untuk menundukkan ketaatan rakyat<sup>13</sup>, pada zaman Orde Baru puri merupakan lambang kekuasaan. Puri bisa disebut kepanjangan tangan Soeharto, untuk memajukan program pembangunan pemerintah saat itu. Bahkan di era reformasi yang memasuki sistem politik demokrasi, kekuatan puri di Bali masih sangat kuat, terutama kekuatan yang bersumber dari nilai-nilai sosial keagamaan yang dianut masyarakat Bali.

Melalui ideologi budaya dan upacara keagamaan, puri menempatkan posisi politiknya sebagai penguasa yang tugasnya mengatur dan mengontrol kehidupan masyarakat, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Masih bertahannya pengaruh puri juga karena faktor modal simbolik berupa prestise yang sudah ada sejak lama, kehormatan menjadi tokoh tertentu dan memiliki kharisma yang besar sudah ada sejak lama dan dapat mempengaruhi orang lain. Hal ini juga diungkapkan oleh (Geertz, 1980) dalam bukunya *Negara: The Theater State in 19th Century Bali*, dikatakan bahwa konsep Negara dalam hal kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai teater. Semakin megah dan besar, maka masyarakat akan tunduk terhadap rajanya.

Nilai-nilai sosial-keagamaan dan budaya yang dianut masyarakat Bali cenderung menciptakan sistem politik feodal. Ketaatan masyarakat Bali tidak lepas dari nilai-nilai agama dan budaya yang telah dianut sejak lama dan akan terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Budaya politik seperti sistem kasta,

---

<sup>13</sup> Beberapa puri di Bali pada waktu penjajahan memiliki “aliansi” dengan Belanda, untuk tujuan politis. Misalnya jika terjadi sebuah perang antar kerajaan, kemudian meminta bantuan dari kolonial.

ngayah, menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Bali. Kekuatan budaya puri cenderung mengarah pada penguasaan unsur batin masyarakat terhadap jasa yang telah diberikan oleh puri. Topik puri dan politik merupakan cerminan bahwa kekuatan tradisional masih mampu bertahan bahkan beberapa kasus, beradaptasi di tengah gelombang modernisasi yang sarat persaingan. Kekuatan tradisional yang berasal dari elite puri merupakan relasi simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan keluarga puri. Tidak hanya dengan masyarakat, simbiosis ini juga terlihat dalam hubungan puri dengan partai politik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang tersebut, peneliti pikir terdapat suatu fenomena sosial politik yang akhirnya dapat diangkat sebagai rumusan masalah. Di mana para bangsawan atau disebut kaum puri ini memiliki sejarah hegemoni kuasa dominasi atas daerahnya. Dengan begitu, seharusnya elite-elite lokal ini masih menjadi kunci-kunci penting dalam sosial-politik di Bali. Karena pengaruh budaya feodalsime yang mengakar dan berbasis tertanam atas nama adat istiadat di sistem sosial Bali. Sehingga puri, walaupun tidak secara *de facto* menjadi kepala daerah, namun memiliki pengaruh terhadap para pemimpin adat. Sehingga kekuatan puri sebagai instrumen politik sangat dilirik oleh organisasi politik, seperti partai politik.

Partai politik seperti yang selalu oportunistik memanfaatkan situasi ini dengan merekrut para tokoh berpengaruh elite puri. Dengan cara merekrut para kaum puri yang sudah dianggap sebagai tokoh masyarakat, menjadikan mereka bakal calon di suatu pemilihan daerah. Kaum puri sendiri terkenal selalu dekat dengan partai politik. Dalam kasus ini, daerah Gianyar yang memiliki banyak tokoh politik berlatarkan puri dan masing-masing memiliki afiliasinya terhadap partai. Walaupun tradisi di Bali, biasanya selalu menyangkal apabila ditanya kedekatannya terhadap partai tertentu. Namun pada kenyataannya, puri memanfaatkan partai politik sebagai kendaraan politik maupun begitu juga sebaliknya dengan partai politik yang menggunakan tokoh puri untuk menjadi klien.



Untuk mempermudah gambaran. Berikut adalah contoh tabel daftar tokoh puri di Kabupaten Gianyar yang masih, atau pernah tergabung dalam partai politik selama periode setelah reformasi hingga sekarang.

**Tabel 1.1 Daftar Pejabat Puri di Kabupaten Gianyar**

No	Nama	Puri	Partai Politik	Jabatan yang di emban Selama Tergabung Partai
1.	Tjokorda Budi Suryawan	Puri Agung Ubud	GOLKAR	Mantan Bupati
2.	Tjokorda Raka Kerthyasa	Puri Agung Ubud	GOLKAR	Mantan DPRD 2 Periode Gianyar
3.	Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati	Puri Kantor Ubud	DEMOKRAT	Wakil Ketua DPRD Bali
4.	I Gusti Ngurah Kapidada	Puri Agung Blahbatuh	GERINDRA	DPRD Gianyar
5.	Tjokorda Gde Putra Pemayun	Puri Agung Pejeng	GERINDRA	DPRD Gianyar

*Sumber: Olahan Peneliti*

Oleh karena hasil rumusan permasalahan tersebut, peneliti pikir di sini terdapat sebuah pola relasi patronase politik yang terjadi antara partai politik dan kaum puri di Kabupaten Gianyar. Menariknya penulis ingin menggambarkan bahwa terdapat model hubungan yang sifatnya ketergantungan diantara kedua elite ini, apakah itu pihak Puri atau Partai Politik untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penulis kemudian membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.) *Bagaimana relasi kuasa dalam hubungan Puri, Masyarakat dan Sejumlah Partai Politik di Kabupaten Gianyar Bali?*

2.) *Bagaimana relasi patronase antara Kaum Puri, Masyarakat, dan Sejumlah Partai Politik di Kabupaten Gianyar?*

#### **1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan temuan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas, terdapat beberapa tujuan dan motivasi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah antara lain; *Pertama*, untuk mengetahui relasi politik antara kaum puri, masyarakat dan partai politik. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana relasi kuasa juga turut mempengaruhi hubungan patronase politik antara kaum puri, masyarakat dan partai politik.

##### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat kepada khalayak luas sebagai: *Pertama*, bagi akademisi; dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam melakukan riset tentang keadaan politik patronase khususnya terutama tentang hubungan elite lokal dengan partai politik serta implikasi relasi kuasa yang ada didalamnya. *Kedua*, bagi masyarakat luas, untuk dapat memberikan gambaran hubungan aristokrasi dan politik partai politik di Bali.

##### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam mendalami penelitian, maka perlu dijelaskan sistematika penulisan sebagai acuan dalam menjelaskan setiap Bab pada suatu penelitian. Untuk itu, berikut sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini:

1.) Bagian Awal Skripsi. Pada bagian awal penelitian ini diisi terkait dengan awalan pada penulisan penelitian ini. Komponen dalam penelitian ini secara runtun adalah: Halaman judul, lembar pernyataan orisinalitas, lembar persetujuan skripsi,

lembar pengesahan skripsi, kata pengantar, kata pengantar, abstrak daftar isi, dan daftar lampiran.

2.) Bagian Inti Skripsi. Merupakan bagian terpenting dari skripsi, yang diisi oleh Bab dan Sub-bab penelitian yang menjadi fokus dan lokus penelitian. Untuk itu, sistematika inti skripsi peneliti sebagai berikut:

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini, peneliti menjelaskan latar belakang dari terjadinya hubungan patronase antara Puri dan Partai Politik. Dengan perumusan masalah topik patronase politik yang terjadi hingga mendapatkan pertanyaan penelitian. Disusul dengan tujuan dan manfaat dilakukan penelitian. Termasuk sistematika penulisan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian tinjauan pustaka, peneliti melakukan tinjauan kepustakaan terhadap penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Serta teori yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori patron-klien James Scott serta teori relasi kuasa foucault yang relevan digunakan dalam penelitian. Pada akhir bab, peneliti juga menampilkan kerangka berpikir yang dijadikan acuan berpikir peneliti terhadap penelitian ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Bagian metode penelitian adalah bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini berbasis menggunakan pendekatan bersifat kualitatif deskriptif. Dengan teknik mengumpulkan data yang berbasis data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder melalui kepustakaan

atau sumber lainnya. Teknik analisa menggunakan model induktif dan naratif. Dilanjutkan dengan teknik keabsahan data, menggunakan metode triangulasi. Bagian akhir bab ini diisi dengan lokasi dan jadwal penelitian dilakukan.

#### **BAB IV**

##### **GAMBARAN KABUPATEN GIANYAR DAN SEJARAH KUASA KAUM PURI DI BALI**

Bab ini di isi gambaran umum, pertama akan menampilkan gambaran awal bagaimana profil wilayah Kabupaten Gianyar. Setelah itu, gambaran tentang Puri di Kabupaten Gianyar yang menjadi objek untuk diteliti. Bagaimana Puri menjalankan kekuasaan dan dominasi pada masa sebelum kemerdekaan. Terakhir, gambaran patron-klien di Bali.

#### **BAB V**

##### **RELASI KUASA KAUM PURI DENGAN MASYARAKAT DAN SEJUMLAH PARTAI POLITIK DI KABUPATEN GIANYAR**

Dalam Bab ini, peneliti menampilkan hasil dari penelitian mengenai relasi kuasa antara puri, masyarakat, dan partai politik. Tepatnya relasi kuasa yang terjadi pada Puri Blahbatuh dan Puri Ubud.

#### **BAB VI**

##### **RELASI PATRON-KLIEN KAUM PURI DENGAN MASYARAKAT SERTA SEJUMLAH PARTAI POLITIK DI KABUPATEN GIANYAR**

Pada bab ini ditunjukkan relasi patronase yang terjadi antara puri dan masyarakat. Serta relasi patronase antara puri dan partai politik, terutama partai Golkar dan Gerindra. Pada bagian akhir bab, diperlihatkan bagaimana hubungan yang bersifat klientelistik yang dilakukan oleh partai politik.

3.) Bagian Akhir Skripsi. Pada bab VII dituliskan mengenai hasil kesimpulan yang dapat ditarik setelah dilakukannya penelitian, serta lampiran penelitian.